

ABSTRAK

Pelanggaran yang dilakukan manusia dengan sanksi pidana tidaklah sulit dalam penerapannya, namun apabila yang melakukan korporasi seperti minimarket melakukan pelanggaran dengan sanksi pidana dalam penerapannya merupakan hal yang kompleks tentang bagaimana pertanggungjawabannya dan siapa yang bertanggungjawab atas tindakan korporasi tersebut. Dalam operasi yustisi di Kota Tegal terdapat sebuah Minimarket yang melakukan pelanggaran perizinan retribusi pada tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal tahun 2012 dengan sanksi berupa pidana, kasus tersebut ternyata sampai ke pengadilan yang termasuk tindak pidana ringan.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran retribusi perizinan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kota Tegal, dalam perkara Nomor 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl. serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelanggaran retribusi perizinan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kota Tegal, dalam perkara Nomor 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen, hasil penelitian terdahulu, situs-situs di internet serta putusan Pengadilan Negeri Kota Tegal No. 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl. Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran retribusi perizinan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kota Tegal, dalam perkara Nomor 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl., telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana pelanggaran retribusi perizinan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal pada putusan perkara Nomor 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl., dalam menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan hal-hal berdasarkan ketentuan pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu : tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelanggaran retribusi, Minimarket.

ABSTRACT

Offense do human with criminal sanctions it is not difficult with applicability, however if that does corporation as minimarket do offense with criminal sanctions applicability is complex about how accountability and who is responsible on the corporate actions. In a operation judicial in the town of legal, there is a minimarket who do offense of licensing levy in the year of 2012 regulate in the local regulation tegal city in 2012 with criminal sanction, the case turns up to court which included misdemeanor.

This report writing was aimed to know about how was judge's consideration in applying of elements for the crime of offense of licensing levy local regulation number 3 the tegal city in 2012 in doing an injustice on court judgement No. 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl. This report used normative juridical as approximation methods and analytical-descriptive for research specification. Using secondary data which was obtained through learning regulation of law, books of literature, document, result of former research, sites of internet and judgment of tegal city court No. 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl. Furthermore, the result data was served as details-form which was arranged systematically and it was normative-qualitative analyzed. In addition, the result data made conclusion regarding:

Applying of elements for the crime of offense of licensing levy local regulation number 3 the tegal city in 2012 in doing an injustice on court judgement No. 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl., the judge had correctly and truly considered and verified between the revealed law facts in court and the juridicial elements for the crime of offense of licensing levy in doing an injustice which were impeached by Public Prosecutor. Here was not found anything which could miss out the punishment responsibility, whether for justified reason or forgiven reason. Finally, the defendant must account for the deed.

The Judges of Tegal City Court on verdict of lawsuit Number : 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl., in handing down yhe verdict of punishment had considered all the things based on provision of verification and appliances of evidence which was regulated on article 184, paragraph (1) of Criminal-Law Procedural Code, those were: witness' testimony and defendant's testimony. In addition, it's based on provision article 197, paragraph (1) Letter of Criminal-law Procedural Code, those were : prosecution and demulcent things for defendant.

Keyword : Criminal Sanction, offense levy, Minimarket.